

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
SOLOK SELATAN**



**OLEH:**

**ANTYA MAKMA  
05 077 033**

**POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**





Nomor Alumni Universitas	ANTYA MAKMA	Nomor Alumni Fakultas
--------------------------	-------------	-----------------------

**BIODATA**

a). Tempat/Tanggal Lahir: Padang / 16 September 1987 b). Nama Orang Tua: Maksun Mahfat dan Zuliasma Zainal c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi e). No. BP: 05 077 033 f). Tanggal Lulus: 20 Agustus 2008 g). Prediket Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: i). Lama Studi: 3 Tahun j). Alamat Orang Tua: Jl. Nangka No. 66 HO III Perumnas Indarung Padang

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

*Tugas Akhir D III Oleh: Antya Makma*

*Pembimbing 1. Wiwik Andriani, SE, Ak 2. Amy Fontaneila, SE, Ak*

**ABSTRAK**

Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu dari SKPD yang ada di Pemerintahan Daerah Solok Selatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan melakukan kegiatan akuntansi untuk tahun 2007 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, seharusnya peraturan yang digunakan adalah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan ini menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran saja. Laporan keuangan yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan memiliki beberapa kekurangan karena tidak membuat laporan keuangan SKPD secara keseluruhan seperti tidak ada Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan dan pada aktiva tetap belum dilakukan perhitungan penyusutan. Akibat dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat terhadap peraturan ini dan kurangnya SDM yang ada menyebabkan peraturan ini belum diterapkan di Tahun 2007. Seharusnya Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan membuat Laporan keuangan SKPD yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta melakukan perhitungan penyusutan nilai asset tetap sehingga laporan keuangan dapat tersaji secara wajar.

Tugas akhir ini telah dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Agustus 2008. Abstrak telah disetujui oleh Pengujian.

Tanda Tangan				
Nama Terang	Renc Fithri Meuthia, SE M.Si, Ak	Ufi Maryati, SE M, Ak, Ak	Arda Rosita, SE, Ak	Wiwik Andriani, SE, Ak

Mengetahui  
Ketua Jurusan Endrawati, SE, Ak  
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas		
Nomor Alumnus Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas:	Nama	Tanda Tangan

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia melaksanakan otonomi daerah setelah terjadinya krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dimana krisis ekonomi yang terjadi membawa dampak yang luar biasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dampak dari krisis ekonomi yang terjadi membuat penurunan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Dimana terjadinya kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang tinggi karena kehidupan yang dihadapi dari dampak krisis ekonomi tersebut. Sehingga membuka jalan munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Salah satu unsur dari reformasi total itu adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah. Didalam pengelolaan ini harus lebih konkrit dan lebih jelas dengan titik berat pada pemerintahan bersih, jujur, terbuka, akuntabel dan responsible serta berorientasi pada kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada masing-masing pemerintah daerah.

Secara umum tujuan akhir dari akuntansi keuangan daerah pada instansi pemerintah sama dengan akuntansi pada perusahaan swasta, yaitu untuk menghasilkan informasi keuangan. Namun perbedaan yang mendasar adalah bahwa akuntansi keuangan daerah merupakan pengelolaan dari anggaran keuangan dalam pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, akuntansi organisasi publik atau akuntansi keuangan daerah tidak berorientasi mencari keuntungan, tapi mengarah pada realisasi anggaran keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi sektor publik di Indonesia selama lima puluh tahun terakhir ini, 1950 sampai 2000-an, diperlakukan sebagai sektoral ekonomi. Perlakuan ini berakibat fokus manajerial tidak tertuju pada penataan organisasi sektor publik, namun lebih pada penataan arus program dan anggaran. Tetapi setelah tahun 2000, diseluruh instansi pemerintahan diberlakukannya akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang mana sistem akuntansi ini diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir ini ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menggunakan peraturan pemerintah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sehingga membuat semua lembaga dan instansi-instansi pemerintah menerapkan sistem akuntansi tersebut secara serentak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi karena belum sempurnanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah membuat adanya perubahan peraturan-peraturan setiap tahunnya. Dimana perubahan sistem yang terus menerus ini membuat lembaga atau instansi-instansi pemerintah belum dapat menggunakannya secara cepat. Pada tahun 2007 ini telah diterapkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 13 Tahun 2006.



## BAB LIMA

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan belum menetapkan suatu kebijakan dan sistem akuntansi dalam penyelenggaraan kegiatan akuntansinya. Selain itu mereka juga belum sepenuhnya menerapkan peraturan-peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan belum membuat laporan keuangan secara lengkap. Dimana mereka hanya membuat laporan realisasi anggaran saja, dan belum membuat Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan realisasi anggaran yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan belum menerapkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan yang dibuat adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan neraca, Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tidak melakukan perhitungan atas penyusutan aset tetap yang dimiliki.

## DAFTAR REFERENSI

- Bastian, Indra. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. (2006a). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2006b). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah (edisi revisi)*. Jakarta: Salemba Empat
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)-PP RI No. 24*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Nodirwan, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- S.R. Soemarso (2003). *Akuntansi Suatu Pengantar (edisi kelima)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumardiyanti, Valentina Sri, dan Surya, Aji. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UDP) AMP YPKN.
- Pusdiklat Sisdur, Kota Bukittinggi
- Roza Amelya, Nelly. (2006). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar*. Padang: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang.